

Membangun Budaya Anti-Kekerasan di Sekolah¹

Oleh: Farid Setiawan

Akhir-akhir ini, para pakar dan praktisi pendidikan kita cukup disibukkan dengan hadirnya sejumlah tindak kekerasan yang tumbuh mekar di lingkungan sekolah. Hal itu muncul sebagai bagian dari begitu derasnya pengaruh informasi yang tampil secara bebas dan terkadang tanpa kontrol sama sekali. Derasnya arus informasi telah mengakibatkan terangsangnya daya imajinasi siswa pada tingginya perilaku kekerasan, agresifitas serta kecenderungan anti-perdamaian terhadap sesama peserta didik. Globalisasi mengajak para siswa untuk dengan mudah mengakses semua itu. Sehingga, budaya anti-perdamaian dapat dilihat dan dipelajari para siswa, secara tidak sadar, melalui berbagai media cetak maupun elektronik.

Media massa sebagai pusat informasi memang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa, tentunya bagi yang mampu memilih berbagai informasi yang sifatnya mendidik. Di sisi lain media massa juga dapat “menjerumuskan” para siswa dalam satu kebuntuan berfikir dengan mengadopsi semua informasi secara total yang mendorong munculnya tindakan-tindakan kekerasan. Semisal, program tayangan *Smack Down* yang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Akibat dari tayangan tersebut telah menyebabkan seorang siswa TK Pertiwi di Bojonegoro Jawa Timur, terpaksa patah tulang setelah meniru permainan *Smack Down* itu. Di lain tempat, seorang siswa SMP di Probolinggo pun menderita patah tulang tangan akibat dibanting temannya saat bermain hal yang sama. Di Yogyakarta, kejadian serupa terjadi pada salah satu siswa SD Kaliurang 1 Sleman yang juga menderita patah tulang akibat “gulat bebas” dengan temannya. Terakhir, siswa SD di Sukabumi Jawa Barat terpaksa menderita luka di kepala saat bermain *Smack Down*.

Begitu mudahnya para siswa menyerap tayangan kekerasan tersebut menandakan kuatnya “pendidikan baru” yang disampaikan melalui media elektronik itu. Hal ini,

¹ Artikel ini telah diterbitkan di Bulletin KAMADA, Edisi VI/Juli 2007

menurut Hikmat Budiman (1997), berarti bahwa perilaku siswa tersebut merupakan cerminan dari apa yang telah dilihatnya melalui layar kaca (baca: televisi). Dalam bahasa sederhana, perilaku siswa kita adalah imitasi televisi!

Kekerasan yang Terlembaga

Bagi lembaga pendidikan, fenomena munculnya beberapa kasus yang telah terjadi akibat tontonan televisi itu sesungguhnya semakin menambah daftar merah atas potret buram dunia pendidikan kita. Jika ditelisik lebih jauh, ternyata juga tidak sedikit diketemukan adanya “pelajaran kekerasan” yang diberikan di dalam sekolah. Pelajaran itu bisa saja diberikan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan, baik dengan cara vulgar maupun terselubung.

Cara-cara “pendidikan kekerasan” yang secara vulgar terlihat manakala seorang guru memukul siswa lantaran tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), memberikan hukuman *push-up* karena telat masuk dll. Sedangkan pada aspek pelajaran kekerasan terselubung itu biasanya muncul akibat “tekanan-tekanan” yang diberikan sang guru kepada siswa. Kekerasan itu berupa iklim tekanan batin yang sesungguhnya sangat mengganggu bagi perkembangan psikologis siswa. Iklim semacam itu selanjutnya menjadikan sosok guru sebagai figur yang wajib diikuti, meski tak jarang pula ditakuti siswa.

Pepatah yang mengatakan bahwa “guru adalah sosok digugu dan ditiru” merupakan satu *prototype* figur guru ideal yang wajib dijadikan teladan siswa dalam segala hal. Menurut Paulo Freire (2002), pendidikan semacam itu akan lebih menciptakan rasa kecintaan kepada segala hal yang tidak memiliki jiwa kehidupan (*nekrofili*) dan bukannya melahirkan rasa cinta pada segala yang memiliki jiwa kehidupan (*biofili*). Dalam arti lain, pola pendidikan tersebut lebih memosisikan siswa sebagai individu yang tak berjiwa serta tidak memiliki bakat yang bisa dikembangkan sama sekali.

Dalam konsepsi semacam ini, siswa merupakan obyek pendidikan yang pasif dan penurut, sedangkan guru adalah subyek aktif. Secara logika, siswa dapat diibaratkan

dengan sebuah, meminjam istilah Paulo Freire, bejana kosong yang senantiasa diisi sebagai sarana penanaman modal ilmu pengetahuan yang dapat dipetik di kemudian hari. Pendekatan semacam ini akan berimplikasi pada masa depan siswa yang menjadikan dirinya sebagai duplikat dari sang guru. Duplikasi itu tentunya berangkat dari rasa ketertekanan psikologis yang teramat sangat. Perjalanan kekerasan psikologis inilah yang selanjutnya mengakibatkan para siswa menjadi kerdil dan sukar untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri di muka umum.

Dengan demikian, apakah memang sudah luntur atau bahkan hilang budaya anti-kekerasan yang terbangun dalam ruang lingkup sekolah kita? Tulisan ini akan sedikit merumuskan alternatif solusi atas dua persoalan tersebut secara sederhana.

Menciptakan Lingkungan Sekolah Anti-Kekerasan

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa proses belajar di sekolah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan perubahan, dalam arti positif, pada diri siswa melalui serangkaian pengalaman yang didapatkannya dalam proses pembelajaran baik secara formal, informal maupun non-formal. Proses pembelajaran tersebut sangat strategis untuk mengembangkan pembiasaan berbudaya damai di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, Suyanto (2004) mantan Rektor UNY pernah mengatakan bahwa “kita harus membiasakan para siswa terhadap budaya anti-kekerasan”.

Lebih jauh, Suyanto juga menuturkan jika membiasakan siswa dengan budaya perdamaian dapat ditempuh melalui beberapa cara, antara lain; *pertama*, menciptakan iklim perdamaian yang kondusif di sekolah. Lingkungan sekolah semacam ini seyogyanya di-*setting* (dikondisikan) sedemikian rupa agar para siswa merasa betah dan menikmati kehidupan yang jauh dari kondisi kekerasan. Keadaan sekolah yang bersih, rapi dan terjaga keamanannya akan membuat siswa dengan mudah membangun budaya anti-kekerasan.

Penanaman nilai-nilai yang terkait dengan persoalan moral, empati, sopan santun, serta tolong-menolong dapat menjadi tolok ukur bagi munculnya kehidupan harmonis di antara siswa. Iklim kesejukan dan pencerminan situasi kekeluargaan seperti ini akan

mendorong inisiatif dan inspirasi para siswa untuk senantiasa berkarya secara positif. Dengan demikian, budaya damai atau anti kekerasan bisa diwujudkan sebagai ruh atau semangat para siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Kedua, klarifikasi nilai-nilai (*values clarification*) universal untuk menganjurkan para siswa mengimplementasikannya dalam wujud membantu orang (siswa) lain dan refleksi total terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan apa yang telah diteorikan oleh Rath, Harmin dan Simon (1978). Menurutnya *values clarification* sangat menekankan pada upaya untuk membantu orang (siswa) mengklarifikasi nilai-nilai yang ada pada diri mereka sendiri dengan cara melakukan refleksi secara total.

Tindakan *values clarification* tersebut dapat berfungsi sebagai wahana koreksi terhadap berbagai kejadian yang dihadapi siswa, tidak terkecuali dengan serangkaian tontonan di televisi. Untuk kepentingan itu, para *stake holders* di sekolah patut untuk memberikan pembinaan semaksimal mungkin agar tindak-tanduk para siswa dapat terpantau dengan baik. Para *stake holders*, khususnya guru, sangat diharapkan agar menempatkan siswa sebagai subyek aktif. Sehingga iklim kekeluargaan dan tanpa tekanan batin dapat tercipta dengan baik di lingkungan sekolah.

Dua pendekatan tersebut merupakan suatu tanggungjawab moral bagi para pelaku pendidikan di sekolah. Jangan sampai hanya karena munculnya sikap arogansi seorang guru agar tetap dapat “digugu dan ditiru” justru menjerembabkan siswa dalam budaya kekerasan terselubung. Begitu juga dengan munculnya berbagai fenomena tindak kekerasan siswa yang lahir dari tontonan layar kaca, yang selanjutnya menjadi “hantu” anarkisme moral para peserta didik pada waktu-waktu terakhir ini. Jika dua pendekatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, niscaya iklim keharmonisan yang selama ini jauh dari budaya anti-kekerasan dapat tercipta di lingkungan sekolah kita. Semoga! []

Wallahu'alam bissowab